

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan setiap sektor dalam perusahaan saat ini semakin pesat, sehingga persaingan semakin ketat dan membuat perusahaan yang ingin tetap bertahan dan memenangkan persaingan harus selalu melakukan inovasi. Inovasi dapat menyebabkan perusahaan berkembang. Perkembangan tersebut memaksa manajemen perusahaan melakukan perluasan usaha, baik dengan melakukan deversifikasi maupun intensifikasi. Perluasan usaha berdampak pada kebutuhan dana yang semakin meningkat. Kebutuhan dana yang terus meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas perusahaan akan menyulitkan perusahaan tersebut untuk memenuhinya. Oleh sebab itu dibutuhkan pihak lain yang memberikan bantuan kepada perusahaan seperti investor dan kreditor.

Untuk melakukan investasi maupun pemberian kredit pada sebuah perusahaan, maka dibutuhkan informasi mengenai perusahaan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan yaitu berupa laporan keuangan. Laporan keuangan mengungkapkan semua informasi yang diperlukan oleh pihak yang membutuhkan, sehingga laporan keuangan ini menjadi acuan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Agar informasi keuangan tersebut bisa membuat investor dan kreditor tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut,

maka kadangkala manajer melakukan beberapa tindakan agar laporan keuangan tersebut menarik dimata investor maupun kreditor.

Laporan keuangan dipublikasikan di pasar modal untuk dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Perusahaan sebagai pihak yang membutuhkan dana, tentunya untuk memperoleh dana tersebut harus mengeluarkan biaya modal (*cost of capital*). Biaya modal didefinisikan sebagai tingkat pengembalian minimum suatu perusahaan yang diukur berdasarkan proporsi ekuitas dari seluruh investasi agar dapat mempertahankan harga pasar sekuritasnya. Biaya modal (*cost of capital*) merupakan konsep penting dalam analisis investasi karena dapat menunjukkan tingkat minimum laba investasi yang harus diperoleh dari investasi tersebut. Jika investasi itu tidak dapat menghasilkan laba investasi sekurang-kurangnya sebesar biaya yang ditanggung maka investasi itu tidak perlu dilaksanakan. Konsep biaya modal dimaksudkan untuk menghitung besarnya biaya yang nyata – nyata ditanggung oleh perusahaan sehubungan dengan penggunaan dana dari suatu sumber. Hasil perhitungan tersebut antara lain akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan menerima atau menolak suatu usulan investasi (Abdul Halim, 2007:69)

Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal (Brigham 2001:427-428):

(1) Faktor faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan : tingkat suku bunga, tarif pajak. (2) Faktor-faktor yang dapat dikendalikan perusahaan : kebijakan struktur modal, Kebijakan dividen, Kebijakan investasi Dalam mengestimasi biaya modal digunakan tingkat pengembalian yang diperlukan atas saham dan

obligasi perusahaan yang beredar sebagai titik awal. Tingkat biaya tersebut mencerminkan risiko aktiva yang dimiliki perusahaan.

Seperti fenomena yang terjadi berdasarkan tribunnews.com, Jakarta senin, 15 Desember 2014 11:27 WIB , bank Indonesia di anggap salah arah di bawah kepemimpinan Agus Marto, Bank Indonesia semakin terlihat salah arah. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 13 November 2014 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,50%, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 7,50% dan 5,75%. Belum sampai seminggu kemudian BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps dan suku bunga lending fasiliti sebesar 50 bps. Hal ini dikatakan oleh A. Deni Daruri, Presiden Direktur Centre for Banking Crisis. Kebijakan tersebut tidak konsisten dengan upaya untuk mengendalikan inflasi menuju ke sasaran $4,5 \pm 1\%$ pada 2014 dan $4 \pm 1\%$ pada 2015, serta menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat karena kenaikan ini sebagai respons terhadap kenaikan harga BBM. Akibatnya buruh melakukan demonstrai besar-besran untuk menaikkan upah minimum karena BI menaikkan tingkat suku bunga. Dalam keterangannya yang diterima tribunnews.com dijelaskan, kenaikan tingkat suku bunga oleh BI tersebut justru menambah high cost economy dan menggerus keuntungan usaha sehingga buruh merasa terancam kelangsungan pekerjaannya. Dengan naiknya tingkat suku bunga maka biaya modal meningkat ketika biaya energi juga meningkat seperti BBM dan listrik yang pada gilirannya meningkatkan biaya transportasi dan konsumsi. Kenaikan tingkat suku bunga tidak mampu meredakan inflasi dan bahkan memukul daya beli buruh yang masih

mengkredit kebutuhan pokoknya sehari-hari. Bukan hanya itu, seiring dengan masih lemahnya permintaan global, pertumbuhan ekonomi domestik masih dalam kecenderungan melambat. (<http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/15/bank-indonesia-dianggap-salah-arah>).

Faktor lain yang mempengaruhi biaya modal (*Cost of Capital*) adalah *Good Corporate Governance*. Menurut Darmawati (2005), Perusahaan yang memiliki kesempatan tumbuh yang tinggi pada umumnya membutuhkan dana eksternal untuk melakukan ekspansi, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam penerapan corporate governance dalam rangka untuk menurunkan biaya modal.

Menurut Adrian Sutedi (2012:1) corporate governance dapat didefinisikan sebagai berikut, Corporate governance yaitu suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika

Seperti fenomena yang terjadi berdasarkan nasional.sindonews.com Kamis, 5 September 2013 – 08:07 WIB. BI sudah meluncurkan Surat Edaran Nomor 13/5/ DPNP tanggal 8 Februari 2011 perihal Transparansi Informasi Bunga Dasar Kredit (SBDK). Kebijakan itu memiliki dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan transparansi mengenai karakteristik produk perbankan termasuk manfaat, biaya, dan risikonya untuk memberikan kejelasan kepada nasabah.

Kedua, meningkatkan good corporate governance (GCG) dan mendorong persaingan yang sehat dan terciptanya disiplin pasar (market discipline) yang lebih baik. SBDK merupakan suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi bank dalam menentukan bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah bank. SBDK merupakan hasil perhitungan dari tiga komponen yakni harga pokok dana untuk kredit (HPDK), biaya overhead yang dikeluarkan bank dalam proses pemberian kredit, dan margin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan untuk aktivitas perkreditan. Harap selalu ingat bahwa SBDK itu belum termasuk premi risiko (risk premium) individual nasabah bank. Kini kesaktian SBDK sedang diuji untuk menekan kenaikan suku bunga kredit. Lalu langkah strategis apa saja yang perlu diambil? Pertama, mengawasi perhitungan komponen SBDK. Memang bank nasional tanpa izin BI dapat menaikkan suku bunga kredit. Kenaikan itu hampir pasti segera terjadi. Mengapa? Karena biaya dana (cost of fund) perbankan akan makin tinggi ketika suku bunga simpanan (terutama deposito) mulai meningkat pelan, namun pasti. Itu bisa terjadi tanpa menunggu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengerek suku bunga penjaminan. Awal September 2013 suku bunga deposito berkisar 4,5% dan 5,5% untuk tenor satu bulan. Perang suku bunga deposito akan kembali membara dalam memburu dana pihak ketiga (DPK). Apa yang dapat dilakukan BI untuk menekan suku bunga kredit? BI wajib melakukan pemeriksaan perhitungan tiga komponen SBDK dengan lebih saksama. Ini dapat dilaksanakan karena bank nasional wajib melaporkan perhitungan SBDK kepada BI bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan. Dengan demikian, bank nasional tidak bisa menyetel margin keuntungan yang

terlalu tinggi. Kedua, menetapkan batas atas premi risiko SBDK. Mudah diterka, suku bunga kredit konsumsi antara lain kredit pemilikan rumah (KPR), kredit tanpa agunan (KTA), dan kredit kendaraan bermotor (KKB: mobil dan motor) akan segera naik. Ini kemudian disusul suku bunga kredit komersial. Potensi risiko apa saja yang bakal muncul di permukaan? Nasabah KPR, KTA, dan KKB sebagai debitur kredit individual akan makin menderita. Calon nasabah baru menjadi ragu-ragu mengambil kredit tersebut karena harus menghitung kembali kemampuan untuk membayar angsuran setiap bulan yang bakal lebih tinggi. Kalau suku bunga kredit komersial mulai membubung tinggi, giliran nasabah perusahaan bakal tertekan oleh ancaman penurunan arus kas (cash flow). Ini disebabkan oleh kenaikan suku bunga kredit yang harus ditanggung. Nasabah jenis ini bahkan akan menanggung biaya modal (cost of capital) lebih tinggi untuk menikmati kredit baru. Karena itu, banyak perusahaan bakal menunda ekspansi bisnis.

(<http://nasional.sindonews.com/read/779454/18/uji-kesaktian-suku-bunga-dasar-kredit-1378343238/1>)

Faktor lain yang mempengaruhi biaya modal (*Cost of Capital*) adalah *Voluntary Disclosure*, menurut Lang dan Lundholm (1996:490) menemukan bukti secara tidak langsung dari penelitiannya tentang adanya keuntungan potensial dari *disclosure* yang tinggi, selain banyak menarik investor juga mengurangi risiko estimasi dan asimetri informasi, di mana masing-masing menunjukkan pengurangan biaya modal. Levinsohn (2001) dalam artikelnya yang berjudul “*FASB Weighs the Value of Voluntary Disclosure*”, menyatakan hal yang sama

mengenai hubungan negatif kedua faktor tersebut, yaitu bahwa *voluntary disclosures* yang informatif dapat membantu para investor untuk memahami strategi perusahaan dan *critical success factor*, kerangka kerja yang mendasari manajemen membuat keputusan serta langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk memastikan kontinuitas hasil yang ditargetkan. Selain itu, dalam laporannya yang berjudul “*Improving Business Reporting: Insighting into Enhancing Voluntary Disclosures*”, yang merupakan bagian kedua dari *Business Reporting Research Project*, FASB (2001) mengatakan bahwa dasar pemikiran dari proyek ini adalah pengungkapan yang lebih baik akan membuat proses alokasi modal lebih efisien dan mengurangi biaya modal.

Seperti fenomena yang terjadi berdasarkan tribunnews.com, Jakarta-Laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2012 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan bahwa Opini WTP tersebut merupakan kontribusi bersama unit Kerja di lingkungan Kementerian PU. Pada tahun 2011 yang lalu, laporan keuangan Kementerian PU mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang salah satunya diakibatkan oleh aset-aset tanah jalan nasional senilai Rp 109 trilin masih diragukan kewajarannya dikatakan oleh Menteri PU saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kementerian PU dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diwakili oleh Anggota IV BPK RI Ali Masykur Musa (18/6/2013). Pada Laporan Keuangan tahun 2012 ini, Kementerian PU sudah berhasil melakukan inventarisasi dan penilaian yang sangat signifikan sehingga

saldo akhir aset Kementerian PU yang pada Neraca tahun 2011 audited baru mencapai Rp 550 triliun, pada tahun 2012 telah meningkat menjadi 723 triliun. Dengan diperolehnya opini WTP-DPP, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan agar laporan keuangan tahun 2013 nanti, kualitasnya lebih meningkat lagi sehingga akan mendapatkan opini WTP yang lebih berkualitas. Menteri PU mengatakan beberapa pekerjaan rumah yang masih perlu dibenahi antara lain adalah Aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, seperti masih terdapatnya temuan-temuan yang terkait kelebihan pembayaran, pelaksanaan yang melampaui batas waktu pelaksanaan, aset PU yang dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak sesuai ketentuan. Selanjutnya Aspek Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan aspek pelaporan Keuangan, yang masih diperlukan peningkatan kualitas pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) agar lebih mudah ditelusuri, khususnya terkait selisih antara Nilai Belanja Modal dengan pencatatannya dalam neraca.

(<http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/06/18/kementerian-pu-dapat-predikat-wtp-dari-bpk>)

Fenomena berikutnya yaitu Kasus Audit yang terjadi pada PT KAI dikatakan berawal dari perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Komite Audit. Di mana Komite Audit tidak mau menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal dan Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang.

Pada masalah pertama yang menjadi perbedaan, yaitu masalah piutang PPN. Karena piutang tersebut nilainya sangat material, maka estimasi kerugian

tersebut harus diperhitungkan. Komite Audit mengatakan bahwa kewajiban perseroan membayar Surat Ketetapan Pajak pajak pertambahan nilai Rp 95,2 miliar, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak pada akhir 2003, disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang/tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak tersebut. Komite Audit berpendapat bahwa kerugian piutang PPN tersebut harus dicadangkan karena kemungkinan tertagih dari pelanggan sangat kecil. Karena hal tersebut tidak dilakukan oleh manajemen, maka laporan keuangan tersebut menjadi salah saji.

Pada masalah ke dua, yaitu beban ditangguhkan yang berasal dari penurunan nilai persediaan, Komite Audit mengatakan bahwa adanya penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sekitar Rp 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukannya inventarisasi pada tahun 2002, pengakuannya sebagai kerugian oleh manajemen Kereta Api dilakukan secara bertahap (diamortisasi) selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sekitar Rp 6 miliar, sehingga Komisaris berpendapat bahwa kerugian tersebut seharusnya dibebankan seluruhnya pada tahun 2005. Dalam masalah ini manajemen tidak menerapkan prinsip full disclosure dalam laporan keuangannya. Akibat dari masalah ini adalah kerugian yang dialami PT KAI menjadi tidak transparan, seolah-olah perseroan ini tidak mengalami kerugian. Padahal, pengakuan kerugian tersebut harus diakui pada saat terjadinya (accrual), tetapi manajemen tidak menerapkan prinsip tersebut, sehingga laporan keuangan menjadi salah saji.

(<http://servingipm.blogspot.com/2012/06/analisis-kasus-audit-umum-pt-kai-tahun>)

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2013) karena belum banyaknya penelitian mengenai pengaruh terhadap biaya modal maka penulis tertarik meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi biaya modal. Penelitian ini memakai sektor perusahaan yang terdaftar di CGPI sebagai objek penelitian. Sektor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan serta faktor pasar lainnya sehingga rentan adanya manipulasi terutama manipulasi terhadap laporan keuangan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah variable *X* yang digunakan dan periode penelitian. Pertama, variable *X* yang dipilih Andriani (2013) adalah tingkat *disclosure*, manajemen laba, asimetri informasi. Sedangkan penelitian ini memilih variable *good corporate governance* dan *voluntary disclosure*. Kedua, tahun penelitian berbeda dengan peneliti sebelumnya, penelitian ini menggunakan tahun 2011-2013, sedangkan penelitian Andriani menggunakan tahun 2009-2013. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti tentang biaya modal, karena masih terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Good Corporate Governance dan Voluntary Disclosure terhadap Cost of Capital”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat *Good Corporate Governance* perusahaan yang terdaftar di *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
2. Bagaimana tingkat *Voluntary Disclosure* perusahaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
3. Bagaimana tingkat *Cost of Capital* perusahaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
4. Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Cost of Capital* pada perusahaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
5. Seberapa besar pengaruh *Voluntary Disclosure* terhadap *Cost of Capital* pada perusahaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
6. Seberapa besar pengaruh *Good corporate governance* dan *Voluntary Disclosure* terhadap *Cost of Capital* pada perusahaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Voluntary Disclosure* terhadap *Cost of Capital*. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat *Good Corporate Governance* perusahaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
2. Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat *Voluntary Disclosure* perusahaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
3. Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat *Cost of Capital* perusahaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Cost of Capital* pada perusahaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh *Voluntary Disclosure* terhadap *Cost of Capital* pada perusahaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Voluntary Disclosure* terhadap *Cost of Capital* pada perusahaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah akuntansi keuangan secara umum.
- c. Hasil penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu good corporate governance, voluntary disclosure dan biaya modal (cost of capital).

3. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan mengenai pengendalian good corporate governance, voluntary disclosure dan biaya modal (cost of capital).

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awam mengenai pengaruh good corporate governance dan voluntary disclosure terhadap biaya modal (cost of capital).

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan *Good Corporate governance*, *Voluntary Disclosure* dan *Cost of Capital*. Serta dapat mengetahui bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Voluntary Disclosure* terhadap *Cost of Capital*.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di pusat informasi pasar modal (PIPM) Bursa Efek Indonesia JL. Veteran No. 10 Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian ini pada waktu yang telah ditentukan.